

Deteksi ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah di Sulawesi tengah

Yesi Aprianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: yesi.aprianti@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji deteksi ilusi fiskal pada anggaran pemerintah daerah. Objek penelitian pada kabupaten/kota bertujuan untuk mengkoreksi penganggaran yang selama ini diterapkan dalam memenuhi belanja masing-masing daerah. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan share dan growth PAD untuk alur teoritis, serta analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel guna melihat variabel yang mempengaruhi realisasi belanja daerah. Variabel PAD, DAU, PDRB dan DAK akan diukur pengaruhnya terhadap belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PAD terhadap total penerimaan daerah di kabupaten/kota pada Propinsi Sulawesi Tengah masih sangat kecil untuk menjadi daerah yang otonom secara keuangan. Dimana sebagian besar daerah di Propinsi Sulawesi Tengah masih mengalami ketidakmandirian keuangan karena share PAD yang rendah dan pertumbuhan PAD yang negatif. Serta terjadi penyimpangan pada penganggaran belanja daerah, dimana terjadi ilusi fiskal berdasarkan hipotesis Flypaper Effect pada keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota pada propinsi Sulawesi Tengah. Dimana variabel PAD tidak berpengaruh pada belanja daerah dan variabel DAU adalah variabel yang paling memberikan kontribusi terhadap belanja daerah.

Kata Kunci: Ilusi fiskal, kinerja anggaran pemerintah daerah

Detection of fiscal illusions in local government budget performance in central Sulawesi

Abstract

This study will examine the detection of fiscal illusions in local government budgets. The object of research in the district/city aims to correct the budgeting that has been applied in meeting the expenditure of each region. The study was carried out using the share and growth PAD calculation method for theoretical flow, as well as multiple regression analysis using panel data to see the variables that influence the realization of regional spending. The variables of PAD, DAU, GRDP, and DAK will be measured the effect on regional expenditure. The results showed that the role of PAD in total regional income in districts/cities in Central Sulawesi Province is still very small to be a financially autonomous region. Where most of the regions in Central Sulawesi Province still experience financial independence because of low PAD share and negative PAD growth. And there is a deviation in the regional learning disbursement, where there is a fiscal illusion based on the Flypaper Effect hypothesis on local government finances in the Regency / City in the province of Central Sulawesi. Where the PAD variable has no effect on regional expenditure and DAU variable is the variable that most contributes to regional expenditure.

Keywords: Fiscal illusion; local government budget performance

PENDAHULUAN

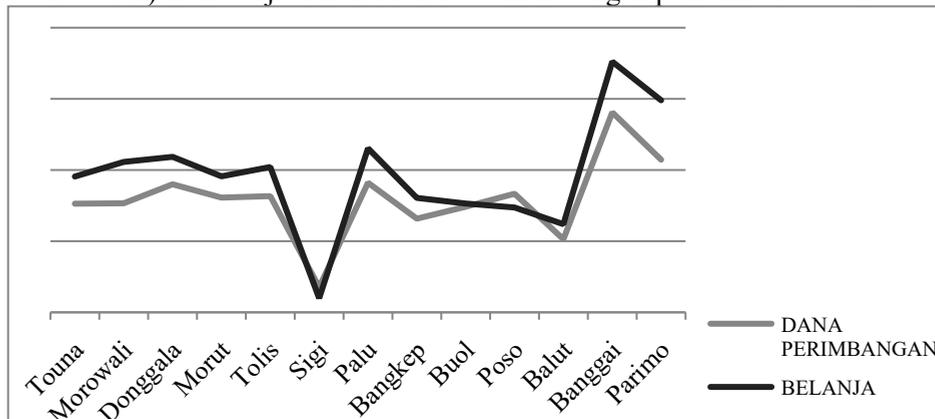
Dewasa ini, kemandirian pada keuangan daerah menjadi hal yang penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu. Abdul Halim (2001) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah. Hal ini diartikan bahwa daerah harus diberikan kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk memenuhi aktifitas pemerintah baik yang bersifat pembangunan dan kegiatan administratif pemerintahan. Sehingga, pemerintah daerah harus mampu meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dan menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan utama.

Dalam penerapan pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian keuangan masih perlu diperhatikan. Terdapat daerah yang belum mandiri secara keuangan menggambarkan ketidakmampuan daerah melaksanakan otonomi. Ketidakmandirian kemampuan keuangan terjadi dapat dikarenakan potensi sumber daya daerah yang rendah untuk memicu pendapatan daerah yang tergambar dari Indeks Kapasitas Fiskal (IKF). Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah akan menerima dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar untuk penganggaran belanja daerah, namun hal tersebut akan menimbulkan tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat.

Yesdi (2016) menyatakan bahwa berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, Kabupaten/Kota sebagai fokus pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh mengalami masalah kemampuan keuangan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, IKF dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan dan belanja pegawai, kemudian membandingkannya dengan jumlah penduduk miskin disuatu daerah. Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kategori rendah, dengan besaran 0.34. IKF Provinsi Sulawesi Tengah merupakan indeks terendah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya pada Pulau Sulawesi. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Secara proporsi, pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah, masih didominasi oleh Dana Transfer Pusat (Dana Perimbangan) dibandingkan PAD. Selain itu, perkembangan pada Belanja Daerah memiliki pola yang lebih mirip dengan perkembangan transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Kondisi penganggaran tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa Belanja Daerah atas pelaksanaan program pemerintah daerah masih tergantung pada besarnya dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kecenderungan berbagai kategori transfer untuk meningkatkan belanja pemerintah lebih dari peningkatan yang setara dalam pendapatan dari pendapatan asli daerah, hal ini disebut Ilusi Fiskal hipotesis Flypaper Effect. Hal ini selaras dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari Yulia (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

Tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat akan menjadi hambatan dalam pengumpulan PAD (Bahrul Ulum Rusydi, 2015). Ketika pemerintah daerah mensimulan belanja yang lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan daripada menggunakan kemampuan sendiri (pendapatan asli daerah) maka terjadi Ilusi Fiskal dalam keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Perbandingan dana perimbangan dan belanja kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tengah

Pada Gambar 1 menunjukkan perbandingan dana perimbangan dengan total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa, besaran total belanja pada masing-masing kabupaten/kota mengikuti besaran dana perimbangan. Namun fenomena tersebut harus dihitung lebih lanjut untuk mengklarifikasi adanya ilusi fiskal pada APBD pemda di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini diterapkan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini akan mengkaji deteksi ilusi fiskal pada anggaran pemerintah daerah. Objek penelitian pada kabupaten/kota bertujuan untuk mengkoreksi penganggaran yang selama ini diterapkan dalam memenuhi belanja masing-masing daerah. Dimana, diduga terjadi perilaku asimetris pemerintah daerah dalam merespon dana perimbangan pemerintah pusat untuk belanja yang anggarakan. Perilaku asimetris pemerintah daerah tersebut, mempengaruhi pola belanja daerah dan menempatkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam kinerja keuangan yang lemah.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menganalisis hasil penghitungan rasio APBD dan regresi berganda dengan belanja daerah sebagai variabel terikat. Indikator-indikator kinerja keuangan tersebut dapat menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung keberadaan perilaku pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang mencerminkan adanya Ilusi Fiskal hipotesis Flypaper Effect.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa data panel, yaitu terdiri data time series dengan periode penelitian 2016-2018 dan data cross section dengan lokasi penelitian pada 1 kota dan 12 kabupaten di Sulawesi Tengah. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dokumenter. Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat, merekam serta reset terhadap data-data lain yang relevan dengan analisis yang dibutuhkan.

Tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan yang didasarkan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Oleh sebab itu, daerah diharapkan menggali potensi sumber pendapatannya sendiri. Namun seiring berjalannya era otonomi, peran pemerintah pusat masih dibutuhkan oleh daerah yang memiliki PAD rendah. Pemerintah berupaya menutupi cela fiskal dengan adanya dana perimbangan. Walaupun dana perimbangan diharapkan tidak lebih mendominasi pendapatan yang bersumber dari PAD. Desentralisasi fiskal sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya diukur kekuatan fiskal daerah dengan menggunakan rasio keuangan share dan growth:

$$\text{Share PAD} = \frac{PAD}{BD}$$

$$\text{Growth Fiskal} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}}$$

Pengukuran kekuatan fiskal akan menjadi koreksi jika terjadi ilusi fiskal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Pengukuran Ilusi Fiskal adalah dengan melihat variabel-variabel penerimaan yang mempengaruhi belanja daerah. Model panel data untuk uji hipotesis adalah:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 PDRB + \varepsilon$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan berpengaruh signifikan dan memiliki kontribusi terbesar terhadap Belanja Daerah (BD). Dengan demikian akan mematahkan hipotesis awal bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh dan memiliki kontribusi besar terhadap BD.

Implikasi DAU merupakan kebijakan yang dikeluarkan sebagai insentif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu stimulan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena penerapannya mengikuti prinsip mengisi celah fiskal. Penggunaan DAK merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan penggunaan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan respon terhadap penerimaan aktivitas ekonomi daerah.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, data dianalisis menggunakan analisis metode panel data dengan teknik efek tetap (fixed effect model). Penggunaan metode ini didasarkan pada asumsi unit cross section diambil secara tidak acak, oleh karena itu, dengan menggunakan asumsi ini maka metode yang lebih sesuai di gunakan adalah fixed effect. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi APBD kabupaten/kota yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyikapi era otonomi, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya harus mampu menjadi sumber utama pendapatan daerah. Sedangkan sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Adi, 2006). Jika PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah, maka akan tercipta pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam pelaksanaan dan penetapan APBD yang menjadi dokumen keuangan atas program-program pemerintah daerah.

Dilihat dari sisi penerimaan, keuangan daerah dikatakan berhasil adalah jika daerah yang mampu meningkatkan keuangan dari sisi penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian, dengan mempertahankan alokasi dari faktor-faktor produksi dan pemerataan serta menekan sejumlah biaya administrasi keuangan daerah dan mengalokasikan sejumlah dana untuk kegiatan yang manfaatnya berkelanjutan.

Berdasarkan perhitungan share PAD, hanya Kota Palu yang memiliki Share PAD diatas 20%. Artinya sekitar 80% dari total belanja daerah masih dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Namun terjadi peningkatan peran PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Ditahun 2018, rasio Share PAD mencapai 23,136%. Perkembangan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan Pemerintah Kota Palu, dengan menggali potensi-potensi PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Share atau kontribusi PAD terhadap total belanja daerah merupakan salah satu variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan sesuatu daerah untuk berotonomi. Variabel-variabel pokok tersebut adalah: (1) Kemampuan keuangan daerah, (2) Terhadap jumlah penduduk, (3) Partisipasi masyarakat, (4) Variabel ekonomi, (5) Variabel demografi. Widjaja, H. (2004).

Pada Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), mengalami peningkatan share PAD secara berkala hingga ke tahun 2018. Hal ini menunjukkan juga terjadi peningkatan terhadap kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah, walaupun dengan persentasi yang masih sangat kurang di era otonomi. Kedua kabupaten tersebut dapat meningkatkan potensi PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan dengan dibuatkannya skema perencanaan penerimaan pajak, perbaikan pengimputan database pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi dan secara online, peningkatan kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi, dan sosialisasi kepatuhan wajib pajak akan pentingnya pemabayaran pajak sebagai sumber pendapatan daerah.

Tabel 1. *Share pad provinsi Sulawesi Tengah*

Kab/Kota	Share PAD		
	2016	2017	2018
Tojo Ua-Una	4.572	5.247	5.788
Morowali	8.303	18.661	15.114
Donggala	5.536	9.876	4.383
Morowali Utara	4.070	5.827	3.666
Toli-toli	6.721	9.131	7.855
Sigi	3.146	7.065	4.347
Palu*	20.244	22.838	23.136
Banggai Kepulauan	2.710	4.969	2.366
Buol	5.586	8.149	6.364
Poso	5.597	8.649	6.389
Banggai Laut	3.788	5.195	3.491
Banggai	4.802	9.082	4.868
Parigi Moutong	5.121	10.690	10.984

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terjadi penurunan share PAD dilebih banyak kabupaten pada Propinsi Sulawesi Tengah. PAD Kabupaten Morowali memiliki kontribusi terhadap

belanja daerah terbesar kedua setelah Kota Palu, walaupun terjadi penurunan rasio pada tahun 2018. Yaitu dengan nilai 8,303 ditahun 2016, 18,661 ditahun 2017 dan turun menjadi 15,114 ditahun 2018.

Sama halnya dengan kabupaten yang lainnya, kontribusi PAD masih sangat kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan. Hal tersebut menjadi indikasi awal adanya ilusi fiskal dalam keuangan pemerintah daerah, di mana terdapat kecenderungan pemerintah daerah tidak berupaya mengoptimalkan PAD sebagai salah satu cara mendapatkan DAU dalam jumlah tetap atau bahkan dapat meningkat jumlahnya. Dimana pemerintah mengharapkan kekurangan kebutuhan fiskal, dapat ditutupi oleh transfer pemerintah pusat.

Pada Tabel 1 tersebut diketahui bahwa terjadi kenaikan kontribusi pajak pada tahun 2016 ke 2017 dan pada tahun 2017 ke 2018. Besarnya kontribusi PAD Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 sampai 2018, mengalami kenaikan rasio yang disebabkan oleh kenaikan pajak daerah. Pada kabupaten lainnya, seperti Donggala, Morowali Utara, Toli-toli, Sigi, Banggai Kepulauan, Boul, Poso, banggai Laut, dan Banggai memiliki nilai share PAD dibawah rata-rata opada tahun 2018, yaitu kurang dari 7,596.

Otonomi daerah dapat memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat menjadi sumber pendapatan. Daerah dapat mengembangkan sumberdaya yang dinilai lebih potensial dan menjadi sumber pendapatan secara berkelanjutan. Berkurangnya wewenang dan pengendalian oleh pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada-beda di masing-masing kabupaten/kota. Bahkan dana yang diperoleh dapat diusahakan daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi (transfer) dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pengukuran terhadap pertumbuhan PAD dipandang perlu dilakukan, sebagai dasar upaya daerah dalam menjalankan wewenang pemerintah daerah di era otonomi.

Tabel 2. Growth pad provinsi sulawesi tengah

Kab/Kota	Growth PAD		
	2016	2017	2018
Tojo Ua-Una	-2,67%	1045,47%	-42,01%
Morowali	-2,21%	161,79%	-16,18%
Donggala	18,28%	60,60%	-57,94%
Morowali Utara	-2,02%	46,77%	-35,83%
Toli-toli	0,04%	57,98%	-20,20%
Sigi	28,21%	134,25%	-94,36%
Palu*	10,08%	1,71%	-6,24%
Banggai Kepulauan	-9,18%	116,29%	-53,41%
Buol	15,82%	43,11%	-36,17%
Poso	4,23%	50,87%	-57,34%
Banggai Laut	61,26%	52,97%	-28,69%
Banggai	-31,91%	130,62%	-51,41%
Parigi Moutong	13,29%	74,48%	6,36%

Persentase atas pertumbuhan PAD akan menunjukkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Pertumbuhan diartikan sebagai angka kenaikan dan/atau penurunan PAD pada satu periode tahun anggaran APBD dengan tahun sebelumnya. Rata-rata persentase pertumbuhan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi bias jika dihitung, hal ini disebabkan keterbatasan data dan lonjakan pertumbuhan PAD pada masing-masing daerah.

Persentase pertumbuhan PAD tertinggi adalah pada Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2017 dengan angka senilai 1045,47% atau tahun 2016 sebesar Rp 48.453,73 juta rupiah menjadi Rp 555.023,06 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat kenaikan pada tahun 2017 pada Kabupaten Morowali sebesar 161,79%, Kabupaten Sigi sebesar 134,25%, Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 116,29% dan Kabupaten Banggai sebesar 130,62%. Terdapat 5 kabupaten kota yang memiliki persentase peningkatan PAD lebih dari 100% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, pertumbuhan PAD pada kabupaten tersebut juga mengalami penurunan. Peningkatan penerimaan PAD, juga dipengaruhi oleh adanya tax amnesty. Kepatuhan wajib pajak membayar pajak meningkat setelah adanya program tersebut.

Penurunan PAD ditahun 2018 disebabkan oleh adanya bencana alam yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten dan Kota yang paling berdampak adalah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parimo. Sedangkan untuk kabupaten lainnya merasakan

imbas dari bencana alam (gempa bumi, tsunami dan likuifaksi) tersebut. Dimana pada beberapa tempat terdapat akses jalan rusak dan aliran listrik terputus sehingga mengurangi pendapatan di beberapa sektor. Pada tahun 2018, hanya Kabupaten Parigi Moutong yang pertumbuhan PAD mengalami kenaikan pertumbuhan PAD, yaitu sebesar 6,36%. Nilai tersebut tidak lebih besar dibanding kenaikan PAD tahun sebelumnya, yaitu 74,48% ditahun 2017 dan tahun 2016 sebesar 13,29%.

Pada Tabel 2 juga menunjukkan adanya sebaran kenaikan dan penurunan pertumbuhan PAD. Tidak terdapat satupun daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami kenaikan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan pada periode penelitian, dimana kenaikan tahun setelahnya tidak lebih besar jika dibanding tahun sebelumnya.

Kota Palu merupakan daerah yang memiliki PAD terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 279.586.96 juta rupiah, mengalami kenaikan 1.71% pada tahun 2017 atau sebesar Rp 284.380,01 juta, selanjutnya turun sebesar 6,24% pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, PAD terbesar adalah pada Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi dan selanjutnya Kabupaten Banggai. Untuk daerah lainnya, masih memiliki rata-rata PAD kurang dari ratusan juta rupiah.

Kabupaten Donggala, dimana pada 2016 terjadi pertumbuhan PAD sebesar 18,28 dan tahun 2017 juga meningkat menjadi 60.60%, namun penerimaan PAD turun pada tahun 2018 sebesar - 57.94% atau hanya penerima PAD setengah dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan Kabupaten Toli-toli, tingkat pertumbuhan PAD naik pada tahun 2016, yang kemudian naik sebesar 57.98% pada tahun 2017, selanjut kembali turun pada tahun 2018. Kabupaten Boul dan Kabupaten Poso juga mengalami hal yang sama, dengan besaran rasio pertumbuhan yang berbeda. Sedangkan untuk Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, terjadi penurunan pertumbuhan PAD pada tahun 2016 dan 2018.

Kenaikan dan penurunan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang dalam pengoptimalan peningkatan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sebaiknya pada setiap tahun anggaran, PAD cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besarnya PAD pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah diperoleh melalui sektor pajak daerah. Peningkatan terhadap PAD dari lain-lain PAD yang sah dapat mengindikasikan bahwa terjadi upaya pengoptimalan sumber daya daerah karena menghasilkan jumlah dana yang tidak diatur namun diperbolehkan dalam peraturan daerah.

Pada setiap tahun pos-pos komponen PAD masih memberi suntikan dana yang kurang besar terhadap daerah total penerimaan daerah. Sehingga saat dilakukan analisis kontribusi PAD terhadap APBD. Angka yang diperoleh PAD menjadi begitu kecil jika dibandingkan dengan APBD. Namun jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah masih mengalami pertumbuhan.

Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki daerah dapat lebih besar dalam pengelolaan keuangannya. Mulai dari proses pengumpulan penerimaan sampai pada alokasi pemanfaatan dana tersebut sebagai belanja daerah. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Gita Dinata (2013). Namun dalam penelitian Deni Oktavia (2014), menemukan bahwa hampir keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan adanya fenomena flypaper effect bila diidentifikasi dari belanja daerah. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil pengolahan data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-277965.016	76458.496		-3.636	.001
PAD	.302	.306	.060	.987	.331
DAU	1.889	.195	.769	9.704	.000
PDRB	8.061	3.954	.118	2.039	.049
DAK	.600	.342	.134	1.755	.088
R Square					0.918
F					94.604
Sig					.000

Pada Tabel 3, menginformasikan bahwa nilai korelasi adalah 0,958. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antar variabel penelitian berada pada korelasi sangat kuat. Dipertegas lagi dengan nilai R². Melalui nilai R² atau koefisien determinasi, menunjukkan seberapa baik suatu model regresi yang dibentuk dari interaksi variable-variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R² yang diperoleh adalah 0.918 atau 91,8% dapat diartikan bahwa variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 91,8% terhadap variabel Belanja Daerah (BD) dan sisanya 8,2% menunjukkan Belanja Modal dipengaruhi oleh variable lain.

Tabel 3 juga menginformasikan nilai taraf signifikansi dari model regresi yang digunakan. Hasilnya, berdasarkan uji F hitung sebesar 94,604 dengan taraf signifikan 0.000. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data dan periode penelitian adalah signifikan sehingga model regresi linier dapat memenuhi dan hasilnya dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

Pada Tabel 3 dirangkumkan juga hasil pengolahan data dari model persamaan regresi yang membentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -277.965,016 + 0.302PAD + 1.889DAU + 8.061PDRB + 0.600DAK$$

Nilai konstanta pada persamaan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara PAD, DAU, PDRB dan DAK terhadap Belanja Daerah. Jika diasumsikan variabel bebas berada dalam keadaan konstan maka belanja daerah akan turun sebesar Rp 277.965 juta rupiah. Hal ini menunjukkan belanja daerah merupakan anggaran yang bersumber dari proses dan hasil pengumpulan PAD, transfer dari pemerintah pusat dan hasil produktivitas daerah yang diproyeksikan dari data PDRB. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh taraf signifikan konstanta lebih kecil dari 0,05 maka nilai estimasi dapat digunakan untuk menganalisis nilai tetap dari belanja daerah di kabupaten/kota Sulawesi Tengah.

Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara PAD dengan Belanja Daerah, dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. Artinya PAD tidak berpengaruh pada belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan hasil pengujian (pada table 3) menyatakan nilai signifikansi PAD > 0.005, yaitu 0.331 dengan Thitung sebesar 0.987. PAD yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah menunjukkan daerah tidak memperhitungkan PAD dalam pembiayaan terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, rata-rata tingkat belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh sumber pendapatan yang berasal dari luar (transfer pemerintah pusat). Daerah tidak mampu membiayai belanjanya sendiri dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah tidak sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara DAU dengan Belanja Daerah, dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Variabel DAU diketahui nilai Thitung sebesar 9.704 dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh dalam pembiayaan belanja daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Koefisien regresi sebesar 1.889. Artinya, jika DAU naik sebesar satu satuan juta rupiah, maka pemerintah akan

merespon dengan menaikkan belanja daerah sebesar 1.889 juta rupiah. Pola hubungan positif, menunjukkan semakin besar dana transfer dari pemerintah dalam bentuk DAU maka semakin besar pula jumlah belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah di Propinsi Sulawesi Tengah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah.

Hipotesis selanjutnya yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara PDRB dengan Belanja Daerah, dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Variabel PDRB memiliki nilai *t*-hitung sebesar 2.039 dan nilai signifikansi $0,049 < \alpha = 0,05$. Hal ini menjustifikasi bahwa PDRB sebagai variabel produktifitas daerah memiliki pengaruh dalam penetapan dan penggunaan belanja daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Koefisien regresi variabel PDRB adalah sebesar 8.061 menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan RDRB sebesar satu satuan juta rupiah, maka pemerintah akan merespon dengan menaikkan belanja daerah sebesar 8.061 juta rupiah. Semakin aktifitas ekonomi oleh masyarakat dan swasta, maka akan semakin besar pula dana jumlah belanja yang dilakukan pemerintah daerah untuk merespon peningkatan aktifitas ekonomi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi daerah di Propinsi Sulawesi Tengah maka semakin besar juga total belanja yang dilakukan pemerintah.

Pengaruh antara DAK dan Belanja Daerah dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel DAK memiliki nilai *t*-hitung 1.755 dan nilai signifikansi sebesar 0.088. Hal ini dapat disebabkan transfer dalam komponen DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program pemerintah pusat yang menjadi urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.

Berdasarkan perhitungan share dan growth PAD, diketahui bahwa peran PAD terhadap total penerimaan daerah masih sangat kecil untuk menjadi daerah yang otonom secara keuangan. Dimana sebagian besar daerah di Propinsi Sulawesi Tengah masih mengalami ketidakmandirian keuangan. Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat cela bagi perilaku “pengatur” belanja daerah yang lebih merespon perubahan terhadap dana transfer pemerintah pusat dibandingkan perubahan PAD. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan lebih banyaknya pertumbuhan negatif pada PAD. Pajak merupakan salah satu komponen kuat dalam pembentukan PAD. Mengupayakan peningkatan dan pengoptimalan komponen-komponen PAD diharapkan dapat mengejar ketertinggalan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang tidak mandiri.

Berdasarkan nilai koefisien dari tiap variabel bebas dalam persamaan, terjadi Ilusi Fiskal berdasarkan hipotesis Flypaper Effect terdeteksi pada keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota pada propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini didasarkan kepada PAD yang tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan belanja daerah secara signifikan dipengaruhi oleh DAU dan PDRB. Pada tabel 3, juga dinyatakan bahwa DAU adalah variabel yang paling memberikan kontribusi terhadap belanja daerah. Terdapat kecenderungan perilaku pemerintah daerah merespon transfer pemerintah pusat lebih besar dibandingkan pendapatannya sendiri melalui belanja daerah.

Muana (2005) memberikan argumentasi bahwa kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini karena daerah akan mendapatkan pemberian DAU yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya rasio kontribusi PAD terhadap total penerimaan). Daerah akan cenderung “malas” dengan tidak mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah yang dapat menyumbang pada pendapatan daerah. Ini mengakibatkan dari tahun ke tahun, pemerintah daerah mengharapakan transfer dana perimbangan yang lebih besar karena rendahnya pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah. Disisi lain, DAU menjadi tumpuan bagi daerah dan menjadi modal dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan program-program kesejahteraan, serta dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pemerintah daerah.

SIMPULAN

Peran PAD terhadap total penerimaan daerah di kabupaten/kota pada Propinsi Sulawesi Tengah masih sangat kecil untuk menjadi daerah yang otonom secara keuangan. Dimana sebagian besar daerah di Propinsi Sulawesi Tengah masih mengalami ketidakmandirian keuangan karena share PAD yang rendah dan pertumbuhan PAD yang negatif. Terjadi penyimpangan pada penganggaran belanja daerah, dimana terjadi ilusi fiskal berdasarkan hipotesis Flypaper Effect pada keuangan pemerintah daerah di

Kabupaten/Kota pada propinsi Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, pemerintah daerah cenderung menggantungkan belanja daerahnya terhadap pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan DAU menjadi variable yang paling dominan dalam menentukan belanja daerah. Peneliti menyarankan penetapan kebijakan daerah otonomi harus diiringi dengan pengawasan terhadap upaya peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. (2001). Manajemen Keuangan daerah. Bunga Rampai, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Ahmad Fawaidurrohman, Noor Shodiq Askandar, Afifudin (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. E-JRA Vol. 08 No. 11 Agustus 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Bahrul Ulum Rusydi (2015). Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2008). Jurnal Iqtisaduna, Volume 1 Nomor 2, Desember 2015: 116-129.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Pengaruh Pertumbuhan EKonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar, ASPP 04. 1-25.
- Deni Oktavia (2014). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013. Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2 Des 2014
- Muana Nanga (2005). Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Gita Dinata (2013). Analisis Kontribusi Pad Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Priyo Hari Adi (2006). “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Derah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali).” Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang 23-26 Agustus, 2006.
- Priyo Hari Adi Puspa Dewi Ekaristi (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 6 - Nomor 1, Juni 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Widjaja, H. (2004). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yesdi Christian Calvin dan Lia Yuliana (2016). Deteksi Ilusi Fiskal Pada Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013. Jurnal Ilmiah WIDYA. Volume 3 Nomor 3 Januari - Juli 2016.